



A close-up photograph of a person's hands with red nail polish typing on a silver laptop keyboard. The person is wearing a blue and white striped shirt. The background is softly blurred, showing a patterned fabric.

PENINGKATAN PARTISIPASI SEBAGAI DAMPAK  
DARI DIGITAL GOVERNANCE

ERNI SAHARUDDIN, S.Sos., MPA

# PENINGKATAN PARTISIPASI SEBAGAI DAMPAK DIGITAL GOVERNANCE

01

DIGITAL GOVERNANCE

02

PARTISIPASI

03

PENERAPAN DIGITAL GOVERNANCE

04

PENINGKATAN PARTISIPASI



# DIGITAL GOVERNANCE

Prinsip dasar dan hubungan dengan e-government







# Digital governance

Digital governance sebagai pengembangan dari e-government

1990an terjadi pergeseran wewenang yang disebut dengan pergeseran paradigma government menjadi governance . Pergeseran ini berupa transfer wewenang dari pemerintah kepada sektor non pemerintah seperti sektor privat, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat secara individual sehingga sektor non pemerintah semakin meningkat dan terbuka aksesnya dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan

# Prinsip dasar governance

Prinsip dasar yang membedakan konsepsi governance (keperintahan) dan pola pemerintahan yang tradisional/government yaitu terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan non pemerintah (privat, organisasi non provit) semakin ditingkatkan sehingga banyak sektor yang terlibat dalam proses governance. Penggunaan ICTs dalam proses governance dimana terdapat banyak sektor yang terlibat (tidak hanya sektor publik tapi juga sektor privat dan sektor non pemerintah)



## Hubungan digital Governance dan e-government

Governance atau pemerintahan adalah suatu proses dimana organisasi non pemerintah (privat, organisasi non profit) terus bertambah dalam penyelenggaraan pemerintah (terutama dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik). Secara bersama berkorelasi antar level governance baik lokal, regional maupun global.

E-governance : penggunaan ICTs pada proses governance/keperintahan

E-government merupakan salah satu komponen dari e-governance karena government merupakan salah satu sektor dalam proses governance





# KONSEP PARTISIPASI

Definisi dan jenis partisipasi dalam kebijakan publik





# Definisi Partisipasi

Sajogyo (2001: 27) mengemukakan partisipasi adalah:

Definisi partisipasi selalu bersinonim dengan peran serta, pengertian partisipasi dapat dimasukkan kedalam tiga artian, yaitu: (1) masyarakat berpeluang ikut menentukan kebijakan, (2) adanya peluang ikut melaksanakan pembangunan, (3) adanya peluang ikut mengawasi dan mengevaluasi hasil pembangunan.

Definisi partisipasi menurut Tilaar (2009: 287) lebih mengedepankan perencanaan dan pembangunan masyarakat. Partisipasi sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

# Pentingnya Partisipasi



Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya, keduanya harus saling mampu bekerja sama. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan pernah mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Tetapi sebaliknya, tanpa peran pemerintah, pembangunan tidak akan berjalan secara teratur dan juga terarah.



Raharjo (2006: 71)  
terdapat 4 jenis partisipasi

Partisipasi dalam pengambilan keputusan

01

Partisipasi dalam pelaksanaan  
pembangunan

02

Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi  
pemabangunan

03

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil  
pembangunan

04



Partisipasi dalam pembangunan hanya dianggap formalitas, musrebang hanya formalitas.

Sekarang partisipasi dikawal dan disistemkan agar partisipasi tersebut tidak hilang dan tidak dianggap sebagai formalitas belaka. Sehingga ICT sangat penting.





## PENERAPAN DIGITAL GOVERNANCE DI SEKTOR PUBLIK DAN NON PEMERINTAH

01

### SEKTOR PUBLIK

Pemerintah membuat aplikasi e-plan, e-musrembang, e-lapor, dsb.

02

### SEKTOR PRIVAT

Halodoc, gojek, penggunaan ICT di RS swasta, market place di fb,

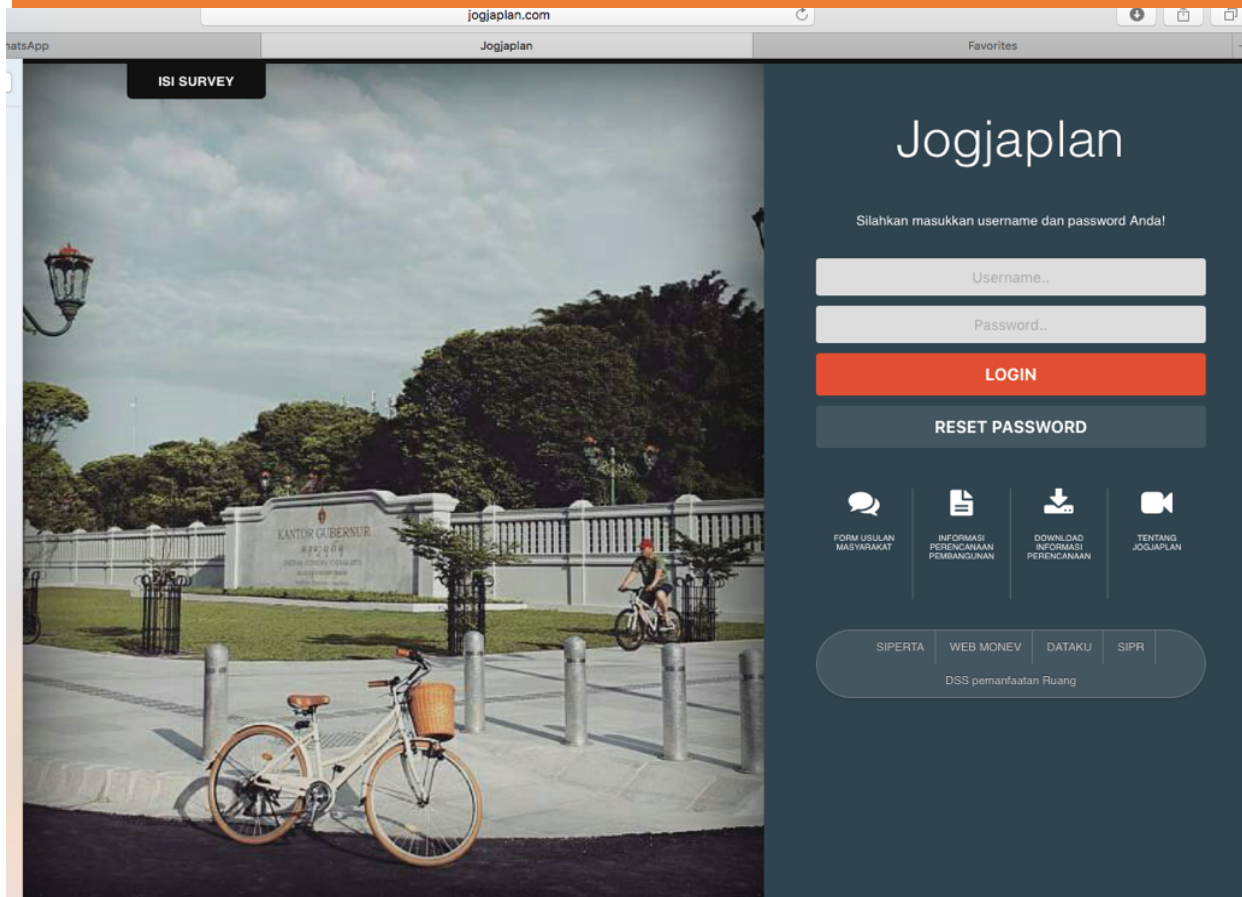
03

### Masyarakat

Sebagai user, dan juga masyarakat bisa mengelola website, memasarkan produknya di dunia maya. Seperti halnya yg terdapat di kampung cyber Patehan kraton



# E-government dalam perencanaan



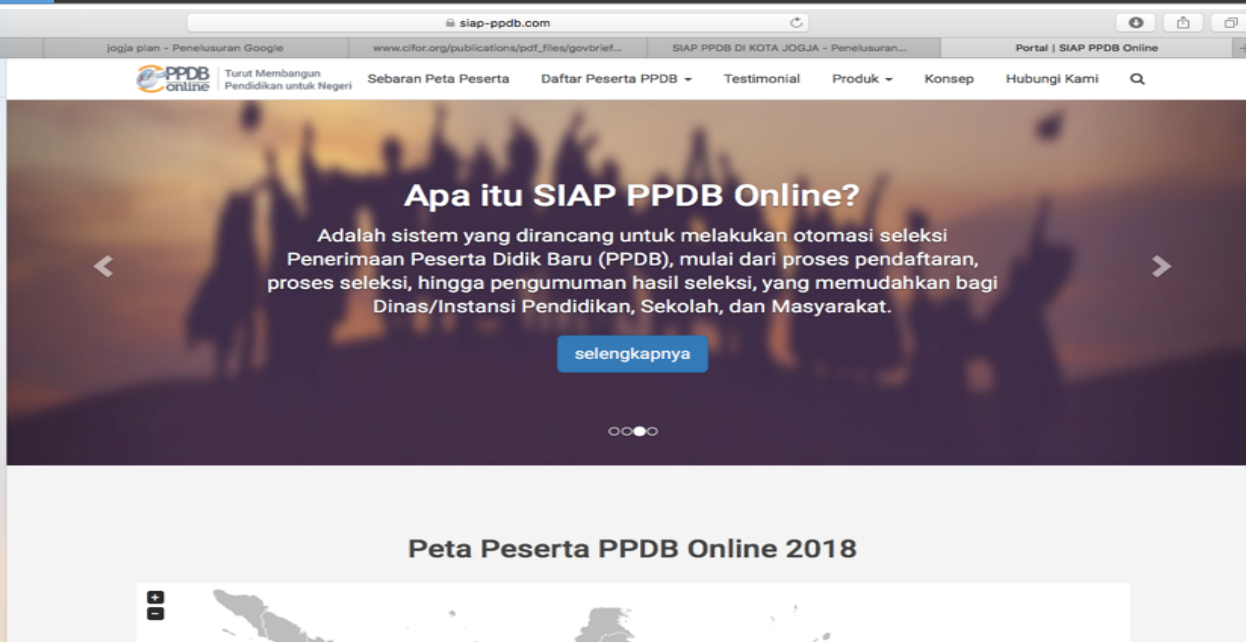
Jogja plan, <https://youtu.be/WECaNj pz8K0>  
Usulan masyarakat diinput di jogja plan

# Pemanfaatan digital governance



1. Bidang Tata Kelola Pemerintahan
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Pendidikan
4. Bidang Kesehatan

# Penerapan digital governance di beberapa bidang



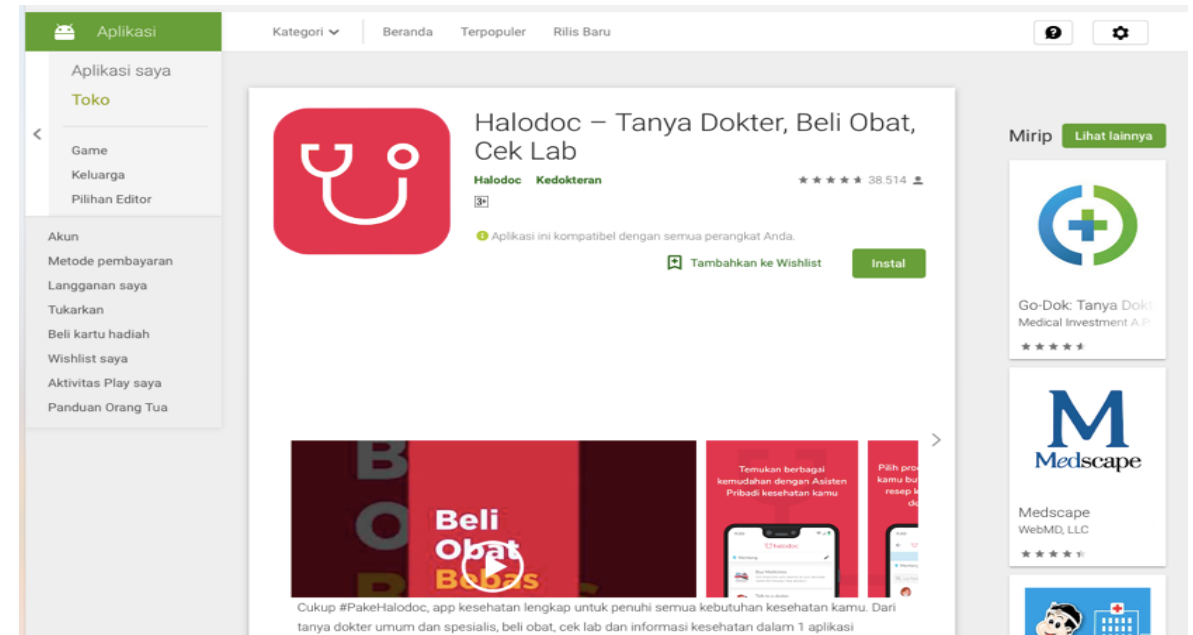
<https://siap-ppdb.com> BIDANG PENDIDIKAN

SIAP PPDB Adalah sistem yang dirancang untuk melakukan otomatisasi seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi, yang memudahkan bagi Dinas/Instansi Pendidikan, Sekolah, dan Masyarakat. Kerjasama dengan PT telkom indonesia

## BIDANG KESEHATAN

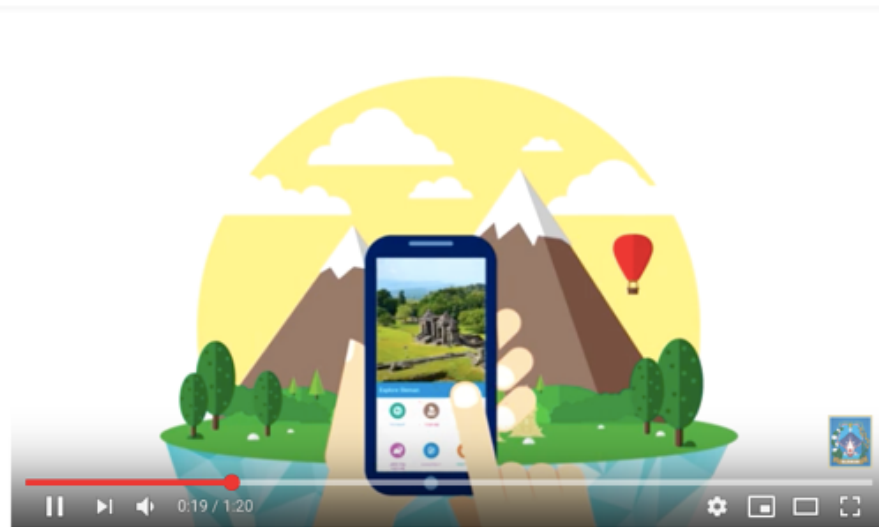
Halodoc : sebuah teknologi [aplikasi](#) kesehatan terpadu yang memfasilitasi interaksi antara dokter dengan [pasien](#) MHealth Tech, perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang teknologi kesehatan, menaungi [aplikasi](#) HaloDoc .

"Tujuan dari HaloDoc ini menyederhanakan akses kesehatan. Pasien bisa dengan mudah berhubungan dengan dokter lewat gawai. Aplikasi ini juga terkoneksi dengan ApotekAntar dan juga laboratorium,"





# Penerapan digital governance di beberapa bidang



Amazing Sleman - Pemandu Wisata Digital Anda

## BIDANG EKONOMI-PARIWISATA

Aplikasi “Amazing Sleman” merupakan aplikasi yang dapat memberikan panduan wisata seputar Kabupaten Sleman dengan lengkap, aktual, serta mudah diakses kapan pun dan dimanapun.

Kerjasama dengan PT Gamatechno Indonesia (Gamatechno)

[https://www.youtube.com/watch?v=H5-i\\_\\_y\\_jCY](https://www.youtube.com/watch?v=H5-i__y_jCY)

## Bidang tata kelola Pemerintahan





# PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI DAMPAK E-GOVERNANCE

## DISKUSIKAN

1. Masyarakat bisa menyampaikan keluhan /kritik kepada pemerintah
2. Masyarakat semakin banyak yang mengurus perijinan usaha
3. Masyarakat dapat mengontrol/ melakukan pengawasan pelaksanaan
  - 4. pembangunan
5. Masyarakat bisa menyampaikan kebutuhannya untuk program pembangunan di daerahnya
5. Masyarakat bisa memasarkan produknya melalui media sosial sebagai bentuk partisipasi pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi.
6. Masyarakat memiliki pengetahuan terkait informasi2 terkini yang dishare oleh pemerintah di website, sosial media
7. Masyarakat tahu terkait kinerja pemerintah



Kepercayaan masyarakat masih kurang dari adanya e-gov karena respon pemerintah yang telat

A close-up, shallow depth-of-field photograph of a person's hands typing on a laptop keyboard. The hands are positioned in the lower half of the frame, with the fingers resting on the keys. The background is a blurred, light-colored surface, possibly a desk or a wall. Overlaid on the image is a large, semi-transparent white circle containing the text 'Thank you'. To the right of this circle are three blue circles of varying sizes, arranged in a cluster. The overall tone is soft and professional.

Thank you